

**UPAYA ADAPTASI MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA SUNGAI TOHOR
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh: Pais Zatul
faisakmal05@gmail.com
Pembimbing: Ashaluddin Jalil
ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293 Telp /Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Aktivitas pembangunan infrastruktur tahun 2007 telah menyebabkan gambut kering. Dua tahun kemudian PT. LUM membangun kanal hingga kedalaman 7 meter dan lebar sekitar 5 meter yang membuat gambut semakin mengering. Efek berkepanjangan dari aktivitas tersebut menyebabkan masyarakat kekurangan air dan terjadilah kebakaran hebat di tahun 2014 yang menimbulkan banyak kerugian. Meskipun telah dilakukan restorasi tetapi tidak begitu saja menghilangkan jejak kerentanan terhadap kebakaran. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk melihat upaya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kebakaran lahan di kemudian hari. Penulis mewawancarai 6 orang informan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan ditentukan berdasarkan *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan adaptasi masyarakat telah berjalan baik, di mana secara structural pemerintahan telah mampu menjawab dan memenuhi infrastruktur fisik pembasahan gambut. Di sisi ekonomi masyarakat mulai terbiasa dan memiliki banyak alternatif mata pencaharian baru tanpa mengelola lahan dengan menggunakan api. Mereka tidak lagi menggunakan cara memerun untuk membuka lahan karena dinilai berpotensi menyebabkan kebakaran. Poin yang masih lemah yakni kurangnya penguatan dari sisi ekonomi sehingga masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa mereka bisa bertahan tanpa mengelola lahan gambut dengan cara yang biasa dilakukan.

Kata kunci: Adaptasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Sungai Tohor

**COMMUNITY ADAPTATION EFFORTS IN LAND AND FOREST FIRE
RISK AREAS IN THE SUNGAI TOHOR VILLAGE TEBING TINGGI
TIMUR SUBDISTRICT MERANTI ISLANDS**

By: Pais Zatul

faisakmal05@gmail.com

Supervisor: Ashaluddin Jalil

ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Campus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Phone/Fax. 0761-63277

Abstract

Infrastructure development activities in 2007 have resulted in dry peat. Two years later PT. LUM built canals up to 7 meters deep and about 5 meters wide, making the peat drier. The prolonged effect of these activities caused the community to lack water and there was a great fire in 2014 which caused many losses. Although restoration has been carried out, it has not eliminated traces of vulnerability to fire. So that the purpose of this study is to see the adaptation efforts made by the community in minimizing the occurrence of land fires in the future. The author interviewed 6 informants with a descriptive qualitative approach and was determined based on purposive. The results showed that community adaptation has been running well, where structurally the government has been able to answer and fulfill the physical infrastructure for wetting the peat. On the economic side, the community is getting used to it and has many alternative livelihoods without managing land using fire. They no longer use the method to clear land because it is considered to have the potential to cause fires. The weak point is the lack of economic strengthening so that people do not fully believe that they can survive without managing peatlands in the usual way.

Keywords: Adaptation, Forest and Land Fires, Tohor River

PENDAHULUAN

Musim kemarau panjang menjadi tantangan tersendiri bagi daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan seperti Provinsi Riau. Karakteristik wilayah yang sebagian bertanah gambut membuat potensi terjadinya kebakaran menjadi lebih tinggi. Hal ini didukung pula dengan pemanfaatan lahan yang terkadang tidak mengutamakan aspek kelestarian, diantaranya masih menggunakan api tanpa terkendali dan pembukaan lahan besar-besaran dengan sistem kanalisasi yang dalam.

Kebakaran adalah peristiwa duka bagi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, hingga mancanegara. Betapa tidak, setiap kebakaran terjadi selalu meninggalkan kisah kelam mulai dari kehilangan sumber penghidupan hingga kehilangan nyawa. Lima tahun terakhir Riau selalu memproduksi asap hingga menyebabkan keresahan berbagai pihak. Kesehatan, pendidikan dan ekonomi menjadi tiga aspek yang sangat terpengaruh oleh adanya asap membuat anak-anak tidak dapat bersekolah, tidak dapat bermain dengan bebas, para petani tidak bisa bekerja, pedagang merugi, dan sebagainya. Untuk lebih menggambarkan tentang luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, berikut disajikan data rekapitulasi kebakaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Luas Kebakaran
Hutan dan Lahan (Ha) di Provinsi
Riau Tahun 2014-2019

No	Tahun	Luas Kebakaran
1	2014	6.301,10
2	2015	183.808,59
3	2016	85.219,51
4	2017	6.866,09
5	2018	37.236,27
6	2019	90.233,00

Sumber: sipongi.menlhk.go.id, 2019.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Riau merupakan wilayah yang sangat rentan. Luasan kebakaran hutan dan lahan terjadi paling besar di tahun 2015, hal ini didukung oleh adanya fenomena alam El Nino yang membuat curah hujan berkurang dan terjadi peningkatan suhu panas disertai angin. Sehingga sangat wajar bila di tahun tersebut luas kebakaran mencapai lebih dari 183 ribu hektar. Demikian pula dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sungai Tohor pada tahun 2014. Jika ditarik ke belakang, gejala akan terjadi kekeringan sudah bermula sejak pemerintah membangun galian kanal di tahun 2007. Pembangunan jalan dan berbagai fasilitas tidak bisa dilakukan diatas hamparan gambut yang bebas, sehingga sebagai cara di sisi kiri maupun kanan dibangunlah kanal agar sebagian kawasan menjadi kering untuk dibangun fasilitas seperti jalan dan sebagainya.

Kanalisis tersebut berujung di laut, sehingga ketika musim pasang tiba, masuknya air laut ke gambut tak terelakkan. Lebar kanal hanya 2 meter,

sehingga air asin telah mematikan pohon-pohon rumbia di pinggir kanal tersebut. Keadaan ini diperparah di tahun 2009, PT. LUM yang merupakan perusahaan pemilik konsesi perkebunan akasia membangun kanal-kanal besar selebar 5-7 meter. Cara ini jelas memperparah keadaan, lahan yang tidak termasuk pada kawasan konsesi ikut pula mengalami kekeringan akibat *tersedot* oleh kanal yang dibuat perusahaan (Hutagaol, Erizal, & Kamari, 2017).

Imbas dari pengeringan ini petani mengalami kerugian besar, pohon rumbia dan tanaman lain yang mereka harapkan untuk kebutuhan sehari-hari mati, tidak bisa dipanen seperti sebelum terjadi kekeringan. Di samping itu, suatu keadaan yang lebih parah adalah masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, beberapa orang ada yang menggali hingga puluhan meter baru bisa mendapatkan air dan sebagian lagi mengungsi dengan tetangga yang masih memiliki air di sumur-sumur mereka serta bagi orang yang kaya mereka rela membeli air seharga 30 ribu per *derigen*.

Kisah pilu diatas merupakan kronologis kekeringan yang terjadi di Sungai Tohor hingga mencapai puncaknya terjadi kebakaran hebat di tahun 2014. Saat itu sekitar 250 hektar lebih lahan terbakar dengan dugaan api berasal dari aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh PT. NSP. Api menghanguskan banyak sekali tanaman dan lahan produktif masyarakat, bukan hanya itu dampak asap juga turut dirasakan oleh warga di Malaysia dan Singapura. Peristiwa ini kemudian mendorong seorang warga untuk membuat petisi yang

ditandatangani oleh lebih dari 23 ribu orang dan membuat Presiden Jokowi untuk kali pertama turun ke Sungai Tohor guna meninjau lokasi kebakaran.

Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Presiden membentuk sebuah badan yang ditugaskan merestorasi atau memulihkan ekosistem gambut di beberapa wilayah termasuk Sungai Tohor. Pada tahun 2017, Badan Restorasi Gambut turun ke tapak dengan memberikan bantuan berupa mesin penggilingan sagu kepada tiga pokmas dan membangun embung serta sekat kanal untuk menjaga air dan lahan tidak kering. Pembangunan ini tentu membawa angin segar bagi masyarakat setempat, setelah nyaris putus asa karena lahan mereka habis terbakar kini harapan mulai bangkit sejak adanya sekat kanal dan embung serta beberapa bantuan lain. Masyarakat yang mayoritas petani total luas lahan garapan mencapai 2.500 ha lebih merasa diuntungkan, tual sagu yang dahulu kerdil kini ukurannya jauh lebih besar dan kualitasnya juga bagus. Masyarakat yang dahulu kekurangan air kini sudah lebih mudah untuk mendapatkan air bersih bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Namun, meskipun telah dilakukan upaya restorasi gambut di wilayah Sungai Tohor tetapi masih ada potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apalagi siklus El Nino merupakan gejala alam lima tahunan sekali sehingga dikawatirkan masih mungkin terjadi kebakaran, hal ini mengingatkan pula di sekitaran wilayah Sungai Tohor perusahaan perkebunan tetap beroperasi. Selama lima tahun sejak 2014 memang tidak

ada lagi kebakaran di Sungai Tohor. Ini sekaligus menandakan bahwa upaya restorasi gambut berhasil dilakukan dengan kerjasama berbagai macam pihak. Akan tetapi, bukan berarti restorasi telah menghilangkan kerentanan lahan terhadap kebakaran apalagi upaya tersebut dilakukan dalam waktu yang sebentar. Kerentanan dan permasalahan sosial tetap saja ada, sebagai contoh apabila sudah tidak ada lagi program restorasi apakah masyarakat akan tetap melakukan upaya adaptif guna mencegah terjadinya kebakaran? Atau justru sebaliknya, permasalahan sosial terletak pula pada ketergantungan masyarakat akan program bantuan dari berbagai macam pihak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pemikiran Talcott Parsons yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem. Menurut Parsons masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas kata sepakat para anggotanya akan nilai, norma dan aturan kemasyarakatan tertentu, suatu *general agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara anggota masyarakat (Craib, 1994).

Lebih jauh pendekatan ini dapat dikaji melalui asumsi dasar yang dimilikinya yaitu setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil, elemen-elemen tersebut terintegrasi dengan baik, memiliki fungsi membe rikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem dilandaskan pada suatu consensus nilai diantara para anggotanya (Darhendorf, 2010).

Dengan kata lain suatu sistem sosial pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem dari elemen-elemen yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara individu yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, namun tumbuh dan berkembang diatas consensus atau nilai diatas standar penilaian umum masyarakat. Paling penting diantara berbagai sumber standar penilaian umum tersebut adalah norma-norma sosial, inilah yang kemudian membentuk struktur sosial.

Pada kenyataannya struktur sosial suatu sistem hanya bisa fungsional apabila semua persyaratan terpenuhi. Suatu sistem sosial akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga *safety Valve* atau katup pengaman yang terkandung dalam paradigma AGIL. Konsep AGIL merupakan akronim dari *adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan alam. Hal ini menyangkut berbagai macam sumber yang dapat berupa sosial maupun non sosial/fisik. Melalui adaptasi ini juga sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. *Goal Attainment*/pencapaian tujuan yaitu persyaratan fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan berfokus pada tujuan pribadi individu, melainkan diarahkan pada tujuan bersama dalam suatu sistem sosial. *Integration*/integrasi yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial

setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Disinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial (Johnson, 1986).

Bagian terakhir yaitu *Latency* atau *Laten Pattern-Maintenance* yang merupakan pemeliharaan pola. Prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma. Konsep laten merujuk pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan terjadinya disintegrasi atau perpecahan maka ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau tetap terpelihara. Di samping persyaratan fungsional diatas, Parsons juga menilai keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada beberapa persyaratan yaitu:

1. Sistem harus terstruktur
2. Harus mampu harmonis dengan sistem lain
3. Sistem harus mendapat dukungan dari sistem lain
4. Sistem harus mampu mengakomodasi para aktor secara proporsional
5. Sistem harus melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktor
6. Sistem harus mampu mengendalikan pelaku yang berpotensi mengganggu
7. Bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan
8. Sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial (Hamilton, Talcot Parsons dan

Pemikirannya: Sebuah Pengantar, terj. Hartono Hadikusumo, 1990).

Menurut Parsons prasyarat kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses sosialisasi yang sukses nilai dan norma sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya nilai dan norma menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. akibatnya ketika aktor sedang mengejar kepentingan mereka secara langsung ia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya. Sementara proses sosialisasi ini berhubungan dengan pengalaman hidup dan harus berlangsung terus-menerus dan dinamis, karena nilai dan norma yang diperoleh sewaktu kecil tidaklah cukup untuk menjawab tantangan ketika dewasa.

Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan sistem sosial dinamis yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Ketika satu sistem hilang disebabkan perbedaan maka hilang pula fungsi masyarakat. Namun, patut dicatat bagaimanapun fundamentalnya perbedaan antara masalah-masalah dinamik yang mengakibatkan perbedaan tidak berarti langsung menghilangkan fungsi utama sebuah sistem karena perbedaan tadi hanya bersifat *particular* dari keseluruhan pola sistem yang utuh (Hamilton, Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar, terj. Hartono Hadikusumo, 1990).

2.2 Konsep Adaptasi

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap

lingkungannya. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungannya, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (Dona, 2001).

Menurut Suparlan, adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupannya. Syarat-syarat tersebut mencakup:

1. Syarat dasar alamiah-biologi, manusia makan dan minum untuk menjaga kestabilan temperature tubuhnya agar tetap berfungsi dalam hubungan harmonis secara menyeluruh dengan bagian tubuh lainnya.
2. Syarat dasar kejiwaan, manusia membutuhkan perasaan tentang yang jauh dari perasaan takut, keterpencilan dan gelisah.
3. Syarat dasar sosial, manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keturunan, tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaannya, untuk mempertahankan diri dari serangan musuh (FIP-UPI, 2007).

Sementara menurut Soerjono Soekanto, memberikan beberapa batasan mengenai pengertian dari adaptasi sebagai berikut:

1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan
2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyesuaikan
3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah

4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan
5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem
6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah (Soekanto, 2009).

Dari batasan-batasan tersebut dapat juga disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian individu, kelompok maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan ataupun suatu kondisi yang diciptakan. Dalam adaptasi juga terdapat pola-pola menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Suryono, pola adalah suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah ada menetap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam hal menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri. Dari definisi di atas, pola adaptasi dalam penelitian ini adalah sebagai unsur yang sudah menetap dalam proses adaptasi yang dapat menggambarkan proses adaptasi kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi, tingkah laku, maupun adat istiadat masing-masing. Proses adaptasi berlangsung dalam suatu perjalanan waktu yang tidak dapat diperkirakan dengan tepat karena waktunya bisa cepat, lambat atau justru berakhir dengan kegagalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah mewawancarai sebanyak enam informan dengan merujuk pada kriteria yang telah dijelaskan pada metodologi. Untuk memberikan gambaran mengenai sosok yang telah dipilih

menjadi informan penelitian, maka penulis akan menjelaskan karakteristik masing-masing pada bagian ini berkaitan dengan aktivitas sehari-hari serta informasi pribadi yang memiliki kekhasan sehingga mereka layak dijadikan sumber data. Berikut ini penulis gambarkan ulasan karakteristik informan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan baik melalui wawancara maupun observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas informan bekerja sebagai petani dengan rata-rata penghasilan 1.500.000-3.5000 dalam satu bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya makan atau lainnya. Meskipun dari tingkat pendidikan berada pada jenjang Sekolah Dasar tetapi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang ekosistem gambut tidak dapat diragukan lagi karena sudah dari kecil diajarkan maupun dilibatkan langsung pada pengelolaan lahan bersama orang tuanya. Temuan yang menjadi keunikan berikutnya yakni bekerja sebagai petani merupakan pekerjaan turun temurun dan hampir semua informan mengerjakan tanah yang sudah terlebih dahulu diolah oleh orang tuanya dengan tanaman sagu maupun tanaman lain.

Di beberapa desa pola penguasaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam sering kali dikuasai oleh segelintir orang dengan modal yang besar. Harga beli yang relatif murah menjadi ajang pemodal menguasai lahan di desa-desa. Potensi yang juga dapat terjadi akibat praktik seperti ini adalah konflik sosial yang diakibatkan

oleh pengelolaan yang cenderung tidak mengedepankan aspek kelestarian. Jauh sebelum izin PT. LUM dicabut oleh kementerian terkait, penguasaan lahan oleh perusahaan ini terbilang cukup besar, 10.930 hektar lebih lahan masyarakat di tujuh desa dikuasai oleh perusahaan tersebut yakni Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat, Lukun, Nipah Sendanu, Sendani Darul Ihsan dan Tanjungsari.

Praktik dari perusahaan dalam mengelola lahan yang kurang mengedepankan aspek kelestarian sebagai contoh dengan membangun kanalisasi lebar dan dalam telah menyebabkan masyarakat resah. Di sisi lain apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menjadi titik awal krisis lingkungan yang terjadi di Sungai Tohor dan beberapa kawasan lain. Kebakaran yang terjadi tahun 2014 misalnya, menjadi satu potret akibat kekeringan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan selain adanya faktor alam yang terkadang sulit untuk diprediksi. Berpuluh-puluh tahun masyarakat berjuang melawan penguasaan dan pengelolaan lahan oleh perusahaan yang membahayakan tersebut hingga pada akhirnya 2016 setelah terjadi tragedi asap pemerintah resmi mencabut izi PT. LUM atas 10.930 hektar yang saat ini akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sering kali penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama lahan berujung pada munculnya masalah sosial masyarakat. Ada kalanya prinsip pengelolaan tidak sesuai dengan kehendak yang seharusnya sehingga menimbulkan konflik yang merugikan. Di Sungai Tohor penguasaan dan pemanfaatan

sumber daya alam masih berjalan dengan baik meskipun ada masalah-masalah yang terjadi tetapi tidak sampai menjadi gejala panas. Kategorinya masih menjadi potensi konflik yang belum menjadi konflik nyata dan terlihat di tengah masyarakat.

Masyarakat kini beruntung dan dapat hidup dengan lega sejak izin PT. LUM dicabut oleh pemerintah. Sebelum dicabut mereka bertahun-tahun berhadapan dengan krisis lingkungan yang sangat berat hingga menyebabkan kebakaran. Untuk saat ini masih ada perusahaan disana tetapi aktivitas mereka sudah tidak membuka lahan baru dan hanya mengelola lahan yang sudah ada dengan prinsip kelestarian gambut. Meskipun demikian masih ada rasa khawatir dari masyarakat akan terjadi peristiwa seperti tahun-tahun sebelumnya yang akan merugikan mereka sehingga sulit untuk beraktivitas.

Berikutnya juga masalah perbedaan kepentingan. Di Sungai Tohor masalah perbedaan kepentingan lebih disebabkan oleh perbedaan pilihan politik sehingga memecahbelahkan dua pihak yang pro dan kontra. Untuk lebih jelas penulis jabarkan pada bagian berikut ini:

Kita semua tahu kalau di Tohor ini jadi program restorasi. Sudah sejak lama sekitar 2017 yang lalu. Bukan Cuma ada dari pemerintah yang menjalankan program itu disini. Ada pihak lain seperti swasta gitulah. Tidak dapat pungkiri kalau mereka datang ini selain membawa program untuk masyarakat untuk mengatasi persoalan kebakaran juga ada dana-dananya. Jadi perputaran uang di Sungai Tohor dapat dikatakan cukup besar. Satu sisi ini

membantu masyarakat bekerja di sisi lain yang seperti ini mulai menjadi apa ya semacam kepentingan begitu. Maksudnya ada orang-orang pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan yang perlu dihindari karena semua yang dilakukan ini berkaitan dengan masyarakat.

Cara Masyarakat dalam Menyelesaikan Masalah

Ciri masyarakat pedesaan adalah mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi di wilayah mereka. Demikian pula pada masyarakat Sungai Tohor, mereka masih mengedepankan musyawarah ketika ada masalah terjadi. Tidak hanya itu, pada perjuangan melawan perusahaan yang lalu masyarakat memanfaatkan media online untuk mengusut aktivitas perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk

Menjadi khas dan kelebihan masyarakat di kampung yakni semua mengupayakan selesai dengan musyawarah. Bagaimana masalah tidak meluas dan selesai dengan solusi yang bisa diterima semuanya. Apapun kecuali kalau memang sudah tidak ada akal lagi cara lagi perjuangan cara menyelesaikan masalah barulah dibawa ke jalur hukum formal. Misalnya ada sengketa tanah kita tak bisa selesaikan ini lari ke jalur hukum. Namun, adanya suatu usaha penyelesaian permasalahan melalui jalur musyawarah patut menjadi suatu contoh kekuatan solidaritas serta kekompakan masyarakat terlepas dari berbagai persoalan yang ada di

wilayah mereka seperti perbedaan kepentingan.

Pola Adaptasi Masyarakat

Masyarakat pada dasarnya menghadapi berbagai persoalan baik yang sifatnya berhubungan langsung dengan fisik (gambut) maupun sosial. Masalah tersebut akan kian pelik ketika dalam situasi krisis yang menimbulkan banyak tekanan dari berbagai sisi. Dari hasil-hasil pengalaman kehidupan masyarakat diaplikasikan sebuah cara adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Ada juga di mana cara tersebut baru muncul ketika suatu masalah terjadi. Artinya, masyarakat cukup fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi dengan cara dan pandangan masing-masing di samping adanya proses adaptasi yang digagas oleh orang di luar desa seperti universitas dan sebagainya. Pada penjelasan berikut, pola adaptasi yang ingin dianalisis yakni menyangkut adaptasi fisik, adaptasi ekonomi, adaptasi structural dan adaptasi kultural.

Merujuk pada teori yang digunakan bahwa Adaptasi merupakan bagian awal yang harus ditempuh oleh individu menuju kehidupan yang harmonis dengan lingkungan sekitar baik social maupun alam. Hal ini menyangkut berbagai macam sumber yang dapat berupa sosial maupun non sosial/fisik. Melalui adaptasi ini juga sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. *Goal Attainment*/pencapaian tujuan yaitu persyaratan fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas

dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan berfokus pada tujuan pribadi individu, melainkan diarahkan pada tujuan bersama dalam suatu sistem sosial. *Integration*/integrasi yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Disinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial (Johnson, 1986).

Bagian terakhir yaitu *Latency* atau *Laten Pattern-Maintenance* yang merupakan pemeliharaan pola. Prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma. Konsep laten merujuk pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan terjadinya disintegrasi atau perpecahan maka ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau tetap terpelihara.

Adaptasi dalam Aspek Fisik

Bagian pertama yakni adaptasi fisik, yang akan dijelaskan adalah cara-cara penyesuaian masyarakat yang berkaitan dengan aspek fisik untuk mencegah karhutla maupun menghadapi berbagai persoalan yang ada. Cara adaptasi fisik berkaitan erat dengan situasi krisis lingkungan dan kebakaran di mana masyarakat dan pemerintah terkait berusaha untuk membuat suatu gagasan yang mencegah terjadinya kebakaran. Berikut ini ulasan dari informan

penelitian mengenai cara adaptasi dalam kaitan aspek fisik.

Adaptasi dalam Aspek Ekonomi

Keadaan yang juga tidak dapat dihindari dari adanya krisis lingkungan dan situasi saat ini yakni terhadap aspek ekonomi masyarakat. Di masa kebakaran ekonomi masyarakat terguncang baik untuk biaya produksi lahan maupun kesehatan mereka. Sementara untuk saat ini situasinya juga berbeda, pandemic turut menyebabkan krisis ekonomi yang bermula dari tidak diterimanya sagu basah dari Sungai Tohor membuat petani tidak bisa memasarkan produk tani sagunya. Tidak hanya itu, untuk menghindari munculnya kebakaran dikemudian hari masyarakat juga melakukan upaya penyesuaian mata pencaharian ada yang mencoba serta ada yang mengganti baik karena inisiatif sendiri maupun dorongan orang lain.

Adaptasi dalam Aspek Struktural

Adaptasi fisik dan ekonomi merupakan dua bentuk penekanan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk menghindari kebakaran maupun mencegah dikemudian hari. Berjalan tidaknya adaptasi structural dan ekonomi sebenarnya dipengaruhi juga oleh kemampuan structural pemerintah melihat peluang yang ada. Di sisi ekonomi, adanya sagu berlimpah perlu dilihat sebagai potensi besar yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari krisis. Begitu pula pada adaptasi fisik, ketika ada rencana pembangunan sekat kanal maupun upaya lain tidak

disosialisasikan dengan baik maka akan menimbulkan konflik. Masyarakat dituntut untuk mengupayakan berbagai aktivitas ramah lingkungan menjaga gambut sementara jika cara tersebut dipilih biayanya relatif besar. Problem seperti ini merupakan masalah fundamental yang menyebabkan seringkali terjadi ketegangan di dalam masyarakat. Berikut ini penulis jelaskan dari sudut pandang informan mengenai upaya adaptasi secara structural yang telah dilakukan.

Adaptasi dalam Aspek Kultural

Pada masa masyarakat dituntut untuk beradaptasi secara kultural berarti mereka dituntut pula untuk menyesuaikan terhadap kebiasaan yang baru. Kaitannya adalah dengan masalah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan cara tidak menggunakan beberapa kebiasaan dalam aktivitas bertani seperti memerun atau terbiasa dengan bangunan-bangunan fisik yang ada dan menyesuainya dengan aktivitas rutin. Cukup sulit untuk menyesuaikan secara budaya karena sampai saat ini masyarakat masih merasa berbagai kegiatan yang dibuat dalam kaitan mencegah kebakaran dinilai belum membuahkan hasil apa-apa bagi mereka.

Merujuk pada perspektif teoritis yang telah dipaparkan pada bagian kajian pustaka, penulis mendasarkan analisis teori Parson secara menyeluruh meliputi semua aspek adaptasi yang ada dalam tulisan ini. Tetapi secara ringkas dapat dijelaskan bahwa tujuan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat di Sungai Tohor pada

dasarnya merupakan suatu bentuk penyesuaian terhadap kondisi alam sekitar. Kebakaran hutan dan lahan menjadi satu bencana yang dihindari karena merugikan berbagai sector serta kalangan masyarakat dan bersifat menyeluruh. Artinya ketika terjadi kebakaran yang merasakan bukan saja masyarakat setempat tetapi juga masyarakat yang tinggal jauh dari wilayah itu sebab kebakaran menyisakan asap pekat yang bisa bergerak menuju kawasan yang lebih luas terbawa gerak angin. Pada dasarnya upaya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak akan berhasil ketika structural di wilayah itu tidak mendukung berjalannya berbagai macam upaya adaptasi. Namun, pola-pola integrasi sebagai bagian dari keberlanjutan suatu upaya adaptasi berkembang dengan baik. Seluruh bagian kelembagaan mulai dari pendidikan, keagamaan hingga pemerintahan memiliki satu keinginan yang sama yaitu menjaga lingkungan. Konsekuensi dari hal itu adalah adanya komitmen mereka dengan memberikan edukasi atau sosialisasi antar sesama bagaimana menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Sementara pemeliharaan pola sebagai aspek penting dimainkan dengan sangat jelas oleh pemerintahan setempat. Mereka mendukung berbagai upaya yang diinisiasi oleh masyarakat maupun pihak lain dengan kepentingan menjaga ekosistem gambut. Merujuk pada terpenuhinya masing-masing komponen pada skema AGIL maka kita dapat melihat bahwa masyarakat telah mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka menggunakan cara-cara kearifan local yang berkembang dari nilai leluhur

maupun pengetahuan baru yang dirangsang oleh berbagai pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa adaptasi masyarakat Sungai Tohor sebagai satu kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cukup baik. Secara structural kelembagaan desa dan pemerintah desa telah bekerja dengan baik mengusahakan suatu tindakan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari segi ekonomi masyarakat juga sudah terbiasa untuk mengerjakan beberapa pekerjaan sebagai sumber penghasilan selain dari pekerjaan utama. Mereka rata-rata adalah seorang petani tetapi tidak jarang melakukan pekerjaan lain seperti menjadi buruh potong maupun buruh angkut tual sagu. Secara kultural masyarakat juga sudah menghindari kebiasaan membuka lahan dengan merun walaupun ini adalah budaya turun-temurun tetapi karena menimbulkan pertentangan pada akhirnya mereka secara sukarela mengabaikan penggunaan merun dari aktivitas bertani yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Dorongan dari structural telah membantu banyak pihak melakukan berbagai program adaptasi secara fisik. Keberadaan sekat kanal merupakan satu bentuk adaptasi secara fisik di samping masyarakat juga sudah terbiasa membuat embung di lahan mereka sebagai cadangan menampung air untuk kebun maupun ketika terjadi kebakaran.

Namun, yang masih menjadi tantangan hingga saat ini yakni masih adanya perusahaan yang beraktivitas di

kawasan tersebut. Meskipun tidak membuka lahan baru tetapi masih ada rasa khawatir dari masyarakat bahwa kejadian serupa pada beberapa tahun lalu akan terulang kembali. Berikutnya juga persoalan kepentingan. Elit di tingkat tapak memiliki perbedaan kepentingan dan cenderung memperlihatkannya dengan menganggap satu kubu yang bukan pendukung sebagai elemen tersingkir dari berbagai aktivitas yang dilakukan di desa. Perbedaan kepentingan yang hingga saat ini masih ada bermula dari perbedaan pilihan pada saat pemilihan kepala desa beberapa tahun lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrofi, A., Ritohardjo, S., & Hadmoko, D. S. (2017). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir dalam Penanganan Bencana Banjir Rob dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). *Ketahanan Nasional Vol. 23 No. 2*, 125-144.
- Basrowi, S. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikian.
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3S.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin, A. (21 5, 2013). *arifburhanuddin.wordpress.com*. Retrieved 1 6, 2020, from arifburhanuddin.wordpress.com: <https://arifburhanuddin.wordpress.com>
- Craib, I. (1994). *Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons sampai Gabernas, terjemahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darhendorf, R. (2010). *Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional dalam Pengantar Sosiologi Politik (Ed) Damsar*. Jakarta: Kencana.
- Dona. (2001). *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya: Indah Surabaya.
- FIP-UPI, T. P. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Imprial Bhakti Utama.
- Firhani, R. R. (2017). *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Tanah Longsor di Desa Lumajang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hafizh, C. A. (2018, Januari 14). *repository.unair.ac.id*. Retrieved April 17, 2020, from repository.unair.ac.id: <https://repository.unair.ac.id>
- Hamilton, P. (1990). *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar, terj. Hartono Hadikusumo*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hutagaol, J., Erizal, & Kamari, A. (2017). *Laporan Pemetaan Sosial Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Meranti Tahun 2017*. Jakarta Pusat:

- Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.
- Idhom, A. M. (2020, April 13). *tirto.id*. Retrieved April 14, 2020, from *tirto.id*: <http://www.tirto.id>
- Ihsanuddin. (2020, Maret 2). *kompas.com*. Retrieved April 14, 2020, from *kompas.com*: <http://www.kompas.com>
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1 & 2 terj.* Jakarta: Gramedia.
- Maharani, S., & Hadmoko, D. S. (2017). *Pola Adaptasi Penduduk dan Arahan Mitigasi Pada Daerah Banjir Lahar Hujan di Bantaran Sungai Code (Kasus Sungai Code, Antara Arteri Utara Hingga Jembatan Kewek)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech Vol. 5 No. 2 Desember*, 1110-1118.
- Pauziah. (2013). *Perubahan Iklim, Adaptasi Petani dan Alternatif Kebijakan*. Banjarbaru: BP2LHK Banjarbaru.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, S. (1985). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahyu. (2011). Adaptasi Petani di Kalimantan Selatan. *Komunitas Vol. 3 No. 1*, 83-91.